AL QODIRI
JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN
Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri

Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia

Lina Rusliana
Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Email. lina2210130345@pasca.iain-palangkaraya.ac.id

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: **DOI:** https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.270-289 *Article History Submission:* 12-06-2024 *Revised:* 28-07-2024 *Accepted:* 14-08-2024 *Published:* 20-08-2024

ABSTRACT
The success of education will be seen if the evaluation measuring tools used are appropriate and can measure each goal. Therefore, relevant measuring instruments are needed so that the measurement results are precise. In making the measuring instrument used, of course, must have a reference or assessment standard used. So that in this article the author is interested in looking further at the implementation and problems of educational assessment standards in the independent curriculum in Indonesia. The writing method in this article uses the literature review method (library research). Throughlibrary research carried out by the author, it is known that the Educational Assessment Standards contained in Permendikbudristek 21 of 2022,implemented in the independent curriculum and began to be implemented in the 2022/2023 school year. The scoring system in the independent curriculum does not look at how many grades (numbers) students get, but looks at how students process each lesson that is carried out, such as the ability of students to reason, find solutions to problems found around them. Various Free Learning programs have become a policy that is considered transformative in the world of education, of course there will be various changes that will be felt by teachers. This change felt by the teacher confronted him with various obstacles that needed to be addressed properly, such as the lack of experience with learning independence made it difficult for the teacher to determine the model, learning media and assessment system to be carried out, the lack of competency in mastering the material possessed by the teacher was one of the causes of difficulties. in compiling assessment instruments used in learning. The problems that occur are not an obstacle but a challenge for teachers to keep moving forward. Teachers are at the forefront of various changes in the world of education, like it or not, they have to be ready to take various efforts and have the courage to learn and try. In order not only to adapt, but also to be able to prepare students as the nation's generation to be able to answer challenges in the future.
Keywords: *Problems; Educational Assessment Standards; Independent curriculum.*

ABSTRAK
Keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang relevan agar hasil pengukuran tepat. Dalam membuat alat ukur yang digunakan tentunya harus memiliki acuan atau standar penilaian yang digunakan. Sehingga pada artikel ini penulis tertarik untuk menilik lebih jauh bagaimana implementasi dan problematika standar penilaian pendidikan dalam kurikulum merdeka di Indonesia. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode literatur kajian pustaka (*library research*). Melalui *library research* yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Standar Penilaian Pendidikan yang termuat dalam Permendikbudristek 21 tahun 2022, terimplementasi dalam kurikulum merdeka dan mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022/2023. Sistem

penilaian dalam kurikulum merdeka tidak melihat berapa nilai (angka) yang siswa peroleh, namun melihat bagaimana siswa berproses dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan, seperti kemampuan siswa bernalar, menemukan pemecahan masalah dari permasalahan yang ditemukan disekitarnya. Berbagai program Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik, seperti tidak adanya pengalaman dengan kemerdekaan belajar membuat guru kesulitan dalam menentukan model, media pembelajaran maupun sistem penilaian yang dilakukan, kurangnya komptensi dalam penguasaan materi yang dimilki guru menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. Problematika yang terjadi bukanlah suatu halangan namun tantangan bagi guru untuk terus maju. Guru adalah garda terdepan dari berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, mau tidak mau harus siap mengambil berbagai upaya dan berani belajar maupun mencoba. Agar tidak hanya beradaptasi, namun juga mampu menyiapkan siswa sebagai generasi bangsa supaya mampu menjawab tantangan di masa depan.
Kata Kunci: *Problematika; Standar Penilaian Pendidikan; Kurikulum Merdeka.*

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut terlansir melalui situs worldtop20.org. *World Top 20 Education Poll* merupakan laman situs terkait survei peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 209 negara. Pada Tahun 2023 Indonesia berada pada urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan persentase lima tingkat pendidikan di Indonesia, meliputi: (1) Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini 68%; (2) Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100%; (3) Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah 91,19%; (4) Tingkat kelulusan SMA78%; dan (5) Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi 19%. Selain itu, posisi pendidikan tinggi dan pendidikan menengah Indonesia di dunia internasional juga belum menunjukkan sinar yang gemerlap. Rangking kampus yang jadi rujukan Dikti yaitu QS WUR dan Times Higher Education (THE). Pada versi QS WUR menempatkan Universitas Gadjah Mada kampus terbaik Indonesia di peringkat 231 dunia. Sementara versi THE pun demikian, posisi kampus terbaik Indonesia yaitu Universitas Indonesia dan masih di peringkat 1001-1200 dunia. Sedangkan pendidikan menengah yang dijadikan standar penilaian adalah rangking PISA. Sejak tes itu dilakukan, di Tahun 2000 Indonesia sudah menjadi negara partisipan. Delapan kali sudah Indonesia mengikuti tes tersebut selama 22 tahun dan yang terbaru tes di Tahun 2022 hasilnya akan diumumkan di Tahun 2023 akhir. Rangking Indonesia belum pernah melewati posisi sepuluh terbawah. Sehingga hal ini berdampak pada reputasi pendidikan di Indonesia dianggap masih rendah secara kualitas (NJ Med,2023).

Djemari Mardapi dalam buku Haryanto (Evaluasi Pembelajaran – Konsep dan Manajemen) menuliskan bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan

melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Sedangkan, sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik (guru) untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik (Haryanto,2020). Berdasarkan uraian di atas sistem penilaian menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain kurikulum dan proses pembelajaran. Penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan karena hasil penilaian yang diperoleh siswa digunakan sebagai acuan guru dalam memetakan kemampuan siswa dan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam melakukan penilaian guru harus berpedoman pada standar penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 pasal 1 memuat tentang pengertian standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar siswa dan penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa (Kemendikbud,2022).

Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan Indonesia) berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka pada Februari 2022. Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pergantian kurikulum yang terjadi tentunya juga merubah penilaian yang dilakukan oleh guru. Perubahan yang terjadi pada sistem penilian pendidikan di Indonesia salah satunya ialah penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang telah diterapkan mulai Tahun 2020 hingga saat ini. Penghapusan Ujian Nasional yang telah diberlakukan secara resmi oleh menteri pendidikan pada Tahun 2021 hingga saat ini masih banyak menuai kontroversi.

Penilaian pendidikan melalui evaluasi dalam bentuk Ujian Nasional merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan di Indonesia. Pihak-pihak yang pro akan dihapusnya Ujian Nasional beralasan, bahwa Ujian Nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar dan materi yang diujiakan terlalu padat. Sehingga, hal ini membuat siswa cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. Ujian Nasional yang dilakukan hanya menyentuh aspek kognitif yang berfokus penguasaan materi, dab belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Sedangkan mereka yang kontra akan dihapusnya Ujian Nasional beralasan, bahwa dengan tidak

adanya Ujian Nasional akan berdampak kemalasan belajar pada siswa. Karena ketika penilaian angka sudah tidak lagi menjadi prioritas utama, dikhawatirkan akan menjadikan para siswa tidak mempunyai keinginan berkompetisi. Mereka akan lebih santai dalam menerima pelajaran. Kurangnya disiplin dalam mengikuti pelajaran, dan bagi beberapa siswa, malah menurunkan minat belajar. Penghapusan UN menjadi masalah baru pada pendidikan khususnya bagi guru. Hal-hal yang dapat menjadi masalah tersebut, yakni 1) adanya perspektif guru-guru yang berbeda, yakni pro ataupun kontra dengan kebijakan penghapusan UN yang diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, 2) adanya ketidaksiapan guru dalam menjalankan kebijakan baru, dan 3) keraguan kualitas akan alat ukur asesmen kompetensi minimum dan surveikarakter (Lutviyana, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, Keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Oeh karena itu, diperlukan alat ukur yang relevan agar hasil pengukuran tepat. Dalam membuat alat ukur yang digunakan tentunya harus memiliki acuan atau standar penilaian yang digunakan. Sehingga pada artikel ini penulis tertarik untuk menilik lebih jauh bagaimana implementasi dan problematika standar penilaian pendidikan dalam kurikulum merdeka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode literatur kajian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini diiambil dari buku-buku ilmiah, literatur, artikel atau jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan artikel yang ditulis untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang penulis angkat dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Standar Penilaian Pendidikan dalam kurikulum merdeka di Indonesia

Sistem penilaian menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain kurikulum dan proses pembelajaran. Penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan karena hasil penilaian yang diperoleh siswa digunakan sebagai acuan guru dalam memetakan kemampuan siswa dan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam melakukan penilaian guru harus berpedoman pada standar penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 pasal 1 memuat tentang pengertian standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar siswa dan penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa (Kemendikbud, 2022).

Permendikbudristek 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berlakunya Permendikbudristek 21 tahun 2022 terjadi bersamaan dengan kurikulum merdeka yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022/2023. Dengan berlakunya Permendikbud tersebut, maka regulasi penilaian sebelumnya sudah tidak berlaku. Adapun Peraturan Menteri yang dicabut adalah Peraturan Menteri No. 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 53 Tahun 2015. Standar penilaian kurikulum merdeka merujuk pada peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilai secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Surat Keputusan BSKAP Nomor 044/H/KR/2022 telah menetapkan lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun pelajaran 2022/2023 (Al Mahfud, 2022).

Pada standar penilaian kurikulum merdeka terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi: (a) Perumusan tujuan Penilaian; (b) Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian; (c) Pelaksanaan Penilaian; (d) Pengolahan hasil Penilaian; dan (e) Pelaporan hasil Penilaian (Kemendikbud, 2022). Implementasi standar penilaian kurikulum merdeka dapat dilakukan dengan berberapa cara, yakni: (1) Penyusunan Standar, dalam penyusunan standar penilai kurikulum merdeka harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Depertemen Pendidikan atau Lembaga Pendidikan lainnya. Standar ditetapkan berdasarkan kompetensi yang diharapakan dan kurikulum dan tujuan pendidikan merdeka; (2) Penyusunan instrumen penilaian harus dikembangkan dengan mengukur kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik berupa tes, observasi, atau lainnya; (3) Pelaksanaan Penilaian dalam kurikulum merdeka harus dilakukan dengan dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (4) Analisis dan perbaikan, dalam hal ini

hasil penilaia harus dianalisis dan digunakan untuk mengevaluasi kualitas kurikulum dan mengembangkan perbaikan yang diperlukan; dan (5) Monitoring dan evaluasi, pada implemenrasi standar penilaian kurikulum merdeka harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi kualitas kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa standar tersebut digunakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan (Ade, 2022).

Mengutip melalui situs wartaguru.id menuliskan bahwa bentuk penilaian kurikulum merdeka dari hasil pembelajaran siswa dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif memiliki tujuan untuk meninjau dan membenahi proses belajar mengajar dan mengevaluasi upaya tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar biaya kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan. Penilaian ini dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Mengutip melalui situs calakpendidikan.com contoh-contoh implementasi asesmen atau penilaian formatif dalam kurikulum merdeka diantaranya terlihat dalam kegiatan berikut: (a) Pendidik memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertantayaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya; (b) Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta siswa untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru dipelajari, 2 hal yang ingin dipelajari lebih dalam, dan 1 hal yang membuat mereka belum paham; (c) Kegiatan percobaan dilanjutkan dnegan diskusi terkait proses dan hasil percobaan kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik; (d) Pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik di berikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri; (e) Penilaian diri, penilaian antarteman, pemberian umpan balik antar teman dan refleksi. Sebagai contoh, peserta didik di minta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan (misalnya, menulis surat untuk teman) tentang konsep yang baru di pelajari; (f) Pada PAUD, pelaksanaan asesmen formatif dapat di lakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat melakukan kegiatan bermain-belajar; (g) Pada pendidikan khusus, pelaksanaan asesmen diagnostik di lakukan untuk menentukan fase pada peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, misalnya: salah satu peserta didik pada kelas X SMALB (Fase E) berdasarkan hasil asesmen diagnostik berada pada Fase C sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap mengikuti hasil asesmen diagnostik yaitu Fase C. Sedangkan asesmen atau penilaian sumatif berbentuk laporan hasil belajar siswa yang memuat laporan pencapaian pembelajaran siswa tersebut, pendidik dalam asesmen ini menggunakan

teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes,namun pula bisa dengan observasi dan performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio). Penilaian sumatif dilakukan setelah pembelajaran berakhir, yakni pada akhir satu lingkup materi atau pada akhir semester (Hidayah, 2023).

Selain hal tersebut di atas, hadirnya kurikulum merdeka menuntut perubahan proses penilaian dan mencari bentuk asesmen alternatif lain. Asesmen alternatif berfungsi untuk mendampingi asesmen konvensional yang ada, salah satu instrumen yang digunakan ialah asesmen autentik. Asesmen autentik asesmen yang berpusat pada siswa dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran melalui tugas rill dan bermakna terhadap kehidupan nyata. O'Malley dan Pierce (1996) menjabarkan asesmen autentik merupakan suatu asesmen yang diimplementasikan untuk menggambarkan, merefleksikan pembelajaran, pencapaian, dan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis asesmen autentik, meliputi: (1) Asesmen kerja yang mengukur keterampilan dan kemampuan. Karakteristik umum dari asesmen atau penilaian kinerja ialah meminta siswa untuk melakukan, membuat, maupun menghasilkan produk. Oleh karena itu, asesmen atau penilaian kinerja mengevaluasi seluruh komponen pembelajaran baik proses maupun produk. Sehingga melalui proses penilaian berbasis kinerja, pemahaman dan penalaran siswa diuji untuk menentukan seberapa baik mereka dapat menerapkan apa yang mereka ketahui; (2) Asesmen Portofolio berupa kumpulan karya siswa yang bertujuan untuk mendoAkumentasikan dan menilai upaya, kemajuan, dan prestasi siswa dalam satu atau berberapa bidang selama periode waktu tertentu. Brown (2004) menuiskan bahwa asesmen portofoio memuat tujuh elemen pokok, yakni *goal orientde* (adanya tujuan pasti yakni dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik), *quality of leaerning* (mampu memperlihatkan derajat hasil belajar), meliputi kegiatan otentik sesuai dengan kehidupan, kolaborasi antar peserta didik, penilaian yang integratif dan dinamis mencakup multidimensi, evaluasi diri atau refeksi, dan asesmen yang menyatu dengan pembelajaran; (3) Asesmen diri (*Self-Asessment*) yang menggambarkan proses siswa menilai dan memberikan umpan balik pada pekerjaan mereka sendiri. Penilaian diri berfokus pada proses memahami lebih banyak tentang siapa kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita belajar. Lesmana dan royani (2020) menuliskan tiga poin utama dalam penilaian diri, yakni evaluasi diri (berfokus pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi kemampuan dan mengidentifikasi kelemahannya), refleksi (berupa hasil evaluasi yang digunakan sebagai bahan refleksi siswa, sehingga ia mampu mengambil langkah-langkah yang diperukan untuk meningkatkan kemampuannya), dan pembelajaran siswa (proses pembelajaran siswa akan

terjadi disaar hasil dari evaluasi diri telah mampu direfleksikan dan siswa mampu menunjukkan satu perubahan ke arah yang lebih baik; dan (4) Observasi dan wawancara. Melalui observasi guru dapat melihat secara jelas dan langsung tentang proses belajar siswa (keaktifan dan prilaku siswa di kelas). Sedangkan melalui proses wawancara, guru dapat menggali informasi tentang siswa mengenai latar belakang siswa, aktivitas bacaan, dan minat (Saryanto, 2022).

Mengutip melalui situs kurikulummerdeka.com (2022), Implemantasi asesmen atau penilaian sumatif dan formatif dalam kurikulum merdeka dilihat melalui 8 paradigma, yakni:

1. Penerapan pola pikir bertumbuh (Growth Mindset). Pada pola pikir Growth Mindset yang dikemukan oleh Carol S.Dweck dari Standford University, berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti dengan kesungguhan dan ketekunan. Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran, lebih penting daripada sebatas hasil akhir. pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh. cara memberikan umpan balik yang berorientasi pola pikir bertumbuh dengan menggunakan tangga umpan balik.Umpan balik tidak hanya memberikan pujian/apresiasi: “Bagus, Nak”, “Keren, Nak”, “Kamu anak pintar”, tetapi mendeskripsikan: klarifikasi, kekuatan, kelemahan, saran, dan apresiasi. Khusus untuk apresiasi, Pendidik dapat mendeskripsikan usaha pan barsungguh-sungguh yang ditunjukkan peserta didik. Umpan balik bisa dilakukan secara lisan melalui dialog dengan siswa atau secara tertulis.
2. Terpadu, Asesmen dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait.
3. Keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Waktu asesmen kurikulum merdeka memiliki kebebasan. Tiga asesmen dengan piihan waktu, yakni: (a) Asesmen diagnostik, dilaksanakan pada awal pembelajaran dan akhir lingkup materi; (b) Asesmen formatif, dilaksanakan selama proses pembelajaran; dan (c) Asesmen sumatif, yang dilaksanakan setelah 1 lingkup materi selesai. Asesmen sumatif juga bisa dilakukan pada akhir semester, yang berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama satu semester.
4. Keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan jenis asesmen atau penilaian dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, serta sumber daya pendukung yang tersedia.
5. Keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Pendidik diberikan keleluasann dalam menggunakan teknik dan instrumen penilaian, meliputi: (a) Teknik

asesmen,berupa observasi (Peserta didik diamati secara berkala dengan fokus secara keseluruhan maupun individu), performaa (asesmen performa bisa berupa paraktik, menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat portofolio) dan tes tertulis/lisan; dan (b) Instrumen asesmen, berupa rubrik (rubrik berupa pedoman penilaian dalam mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik), eksemplar (berupa hasil karya yang dijadikan sebagai standar pencapaian, pembanding), ceklis(daftar informasi data, ciri-ciri, karakteristik atau elemen yang dituju, catatan anekdotal (berupa catatan hasil observasi peserta didik yang memuat performa, prilaku peserta didik disertai latar belakang kejadian dan hasil analisa observasi), dan grafik perkembangan peserta didik(kontimun) yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik.

Asesmen (penilaian) dan evaluasi merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar, karena asesmen dan evaluasi mampu menggambarkan capaian siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Sarynto (2022) Asesmen dalam kurikulum merdeka memuat lima konsep, yakni:

1. Asesmen menjadi satu kesatuan dengan pembelajaran. Artinya, asesmen tidak lagi bagian lain dari pembelajaran namun asesmen merupakan bagian proses pembelajaran itu sendiri yang dirancang tidak hanya pada akhir pembelajaran namun mulai dari awal proses pembelajaran. Asesmen dalam kurikulum merdeka digunakan untuk memfasilitasi proses belajar dan sebagai bentuk refleksi pembelajaran bagi guru, siswa, dan orang tua.
2. Asesmen dalam kurikulum merdeka harus bermakna. Kebermaknaan ini, meliputi proses asesmen formatif, sumatif dan diagnosis yang ketiganya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar dan mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan hasil belajar. Pendidikan bermakna berlandaskan empat pilar, yakni *learning to know* (belajar pengetahuan), *learning to do* (dimana siswa mengaplikasikan), *learning to be* (dimana siswa belajar menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk hidup), dan *learning to life together* (dimana siswa menyadari bahwa adanya rasa ketergantungan sehingga diperlukan adanya kerjasama untuk hidup bersama.
3. Asesmen dalam kurikulum merdeka belajar harus dirancang secara matang, bersifat adil dan objektif, valid dan memiliki realibilitas tinggi, serta dapat dipercaya sebagai bukti otentik bagi siswa dan orang tua tentang proses dan hasil belajar siswa.
4. Asesmen dalam kurikulum merdeka haruslah bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

5. Laporan bersifat sederhana dan informatif sehingga siswa dan orang tua bisa memahaminya. Informasi berisi penilaian karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi yang dirancang oleh guru berdasarkan hasil diskusi bersama orang tua siswa sebagai tindak lanjut atau umpan balik selama proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dalam menyusun standar penilaian pendidikan, pemerintah terus berupaya agar pengaturan mengenai penilaian pendidikan selaras dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penilaian hasil belajar. Pemahaman akan sistem penilaian yang tepat dan sesuai merupakan salah satu langkah terciptanya perubahan positif dalam lingkup sistem penilaian di masa depan. Sistem penilaian dalam kurikulum merdeka tidak melihat berapa nilai (angka) yang siswa peroleh, namun melihat bagaimana siswa berproses dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan, seperti kemampuan siswa bernalar, menemukan pemecahan masalah dari permasalahan yang ditemukan disekitarnya. Sistem penilaian dalam kurikulum merdeka dikenal dengan sebutan Asesmen Nasional (AN), asesmen nasional menilai siswa, sekolah, dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuan setiap satuan pendidikan di daerah sehingga capaian kompetensi dapat tercapai dan proses pembelajaran berjalan kondusif. Kemudian, adanya standar penilaian pendidikan sebagai acuan yang digunakan guru dalam dalam memetakan kemampuan siswa dan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya.

b. Problematika Standar Penilaian Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia

Dunia Pendidikan harus mampu meyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Tantangan pada era globalisasi menuntut guru dan siswa untuk menerapkan kurikulum yang selaras dengan perkembangan zaman dari ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). Upaya peningkatan kualiatas pendidikan di Indonesia dilakukan oleh Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan Indonesia) melalui pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Pergantian kurikulum yang terjadi tentunya juga merubah sistem penilaian pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menetapkan standar penilaian pendidikan terbaru pada Tahun 2022. Standar Penilaian Pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) N0. 21 Tahun 2022. Adanya standar penilaian pendidikan terbaru tersebut berlaku bersamaan dengan kurikulum merdeka yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022/2023.

Standar penilaian pendidikan yang terimplementasi dalam kurikulum merdeka oleh satuan pendidikan dilakukan secara bertahap. Adanya perubahan pada kurikulum berdampak pula dalam sistem penilaian. Susanti, Rahmadona, dan Firtia (2023), menuliskan perbedaan penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada setiap jenjang pendidikan, bahwa: (1) Pada jenjang PAUD (5-6 Th), dalam evaluasi kurikulum 2013, proses perkembangan anak dan hasil belajar yang dilakukan melalui proses evaluasi mingguan atau bulanan yang dicatat kemudian ditarik kesimpulan guna pelaporan perkembangan anak kepada orang tua. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, pelaporan tertulis pada orang tua siswa dilakukan minima 6 bulan sekali. Kurikulum merdeka memuat gambaran pembelajaran anak.

Untuk laporan atau komunikasi secara verbal juga dilakukan guru dengan orang tua bisa dilakukan kapan saja; (2) Pada jenjang SD/SLDB/MI dan SMP/SMPLB/MTS serta SMA/SMALB/MA/SMK, proses penilaian dalam kurikulum 2013 dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka dilakukan dengan penguatan melalui evaluasi dalam penilaian autentik terutama sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar pancasila; dan (3) Pada jenjang pendidikan khusus, proses penilaian dalam kurikulum 2013 terbagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan, proses penilaian dalam kurikulum merdeka melalui konfirmasi penilaian diagnostik yang menghasilkan penilaian yang tidak hanya memperoleh profil siswa namun juga usia mental, tahap belajar siswa, dan penyusunan program pembelajaran yang tepat. Melalui penilaian atau asesmen diagnostik diharapkan mampu mengidentifikasi kemampuan, minat, dan faktor anak yang menghalangi anak untuk belajar. Diagnostik pada jenjang pembelajaran khusus dibuat oleh para profesional (Psikolog) yang bertujuan untuk menentukan usia mental dan membuat diagnosis, namun jika hasil diagnosis tidak terdapat peyakit mentak maka tenaga ahli (psikolog) bisa digantikan dengan guru kelas/guru bimbingan konseling yang mana hasil evaluasi yang dilakukan didiskusikan bersama (Marnis, 2023).

Konsep merdeka belajar merujuk pada merdeka dalam berpikir. Dalam hal ini guru sebagai komponen utama pendidikan diberikan kebebasan secara mandiri untuk menterjemahkan kurikulum sebelum diajarkan kepada siswa. Kemampuan guru memahami kurikulum yang ditetapkan akan menjawab kebutuhan para siswa selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi tuntutan bahkan tantangan bagi guru. Riadi (2017) menuliskan dalam jurnalnya, bahwa tantangan yang dihadapi guru menjadi lebih berat dalam meningkatkan kemampuan siswa sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Sehingga, perlunya peningkatan kualitas dengan memperkuat kompetensi profesi keguruan. Kurangnya kompetensi

yang dimiliki guru menimbulkan permasalah dalam dunia pendidikan terlebih dalam ketidakberhasilan guru melakukan evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di era merdeka belajar (Akhmad, 2023). Kemudian, Ihsan (2022) dalam jurnalnya menuliskan bahwa masih banyak guru yang bingung dalam menerapkan kurikulum merdeka terkait hal apa saja yang dibutuhkan saat proses pembelajaran di sekolah hingga bentuk penilaian yang dapat diterapkan di kurikulum merdeka (Muhammad, 2022). Selain itu problem yang dialami guru terkait penilaian atau dikenal dengan asesmen pada kurikulum merdeka juga di tuliskan oleh Eka Rahayu, Fina Diafatus Sa'adah dan Annisa Nur Hidayatin (2023).

Banyak guru masih kesulitan dalam melakukan penilaian, karena ketidaksiapan guru menyusun instrumen penilaian yang digunakan, mengobservasi perkembangan siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka serta ketidakpahaman guru dalam memahami komponen-komponen yang harus dinilai dan cara menilai hingga muncul nilai di rapor (Eka, 2023). Selain itu, problematika guru dalam merencanakan Kurikulum Merdeka Belajar pada, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran adalah kesulitan menganalis CP, merumuskan TP dan menyusun ATP dan Modul Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, minimnya kemampuan menggunakan teknologi, membatasinya buku siswa, kekurangan kemampuan menggunakan metode dan media pembelajaran, materi pelajaran terlalu luas, menentukan proyek kelas, kurangnya alokasi waktu pembelajaran berbasis proyek, menentukan bentuk asesmen dan bentuk asesmen pada pembelajaran berbasis proyek, hal diungkap oleh Siti Zulaiha,dkk (2022) dalam penelitiannya di SDN Rejang Lebong.

Perubahan kurikulum akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal, misalnya dari sisi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kemampuan yang dimiliki siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk penetapan kebijakan dan langkah pembelajaran selanjutnya. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian dan pengukuran. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan atau informasi karakteristik suatu objek. Oleh karena itu, penilaian menjadi proses terpenting dalam menentukan hasil evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini guru menjadi perantara untuk mewujudkan tujuan pendidikan di era merdeka belajar melalui kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Aini Zulfa Izza, Mufti Falah, dan Siska Susilawati (2020) menuliskan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan di era merdeka belajar. Guru harus memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran sehingga diharapkan guru mampu mewujudkan pembelajaran

yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, dan kegiatan evaluasi berfungsi sebagaimana mestinya. Namun nyatanya, terdapat guru yang tidak memperdulikan hal tersebut. Pada pembelajaran yang terpenting guru masuk kelas, mengajar, melakukan evaluasi yang monoton, mengutamakan pada nilai akhir, melaksanakan waktu evaluasi sesuai atas kemauan dan kemudahan guru tanpa memperdulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Anggapan guru yang terpenting pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era merdeka belajar (Aini, 2020).

Selain hal tersebut di atas, merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan baru oleh kemendikbudristek yang melahirkan empat keputusan yang mana keputusan tersebut menuai pro dan kontra dalam dunia pendidikan, yakni: (a) Pertama, penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen dan Kompetensi Minimal (AKM) dan Survei Karakter (SK); (b) penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); (c) penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan (d) peraturan PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Lukman, 2020). Program pendidikan merdeka belajar memberi paradigma baru bahwa pendidikan tidak lagi hanya sebatas penilaian kognitif saja, namun juga penilaian afektif dan psikomotorik. Mengutip dari situs beritakita1.click, kebijakan kurikulum merdeka yang berlaku sejak April 2022 tentang penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi topik hangat dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022, disebutkan bahwa penilaian pada pendidikan dasar dan menengah harus berbasis kompetensi dan pengembangan karakter. Artinya, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, namun juga memperhatikan aspek non-akademik seperti kemampuan beradaptasi dan kemampuan interpersonal. Dalam hal ini, USBN dianggap tidak relevan dengan pendekatan penilaian berbasis kompetensi dan karakter yang diusung oleh Kurikulum Merdeka. Penghapusan USBN dalam kurikulum merdeka didukung oleh banyak ahli pendidikan. Jumeri selaku Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, mengemukakan bahwa USBN yang dilaksanakan hanya menekankan pada akumulasi nilai, sehingga tidak menggambarkan kemampuan siswa. Sedangkan, penilaian berbasis kompetensi yang canangkan oleh Nadiem Makarim dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan, dan memecahkan masalah (Jabal, 2023).

Mengutip dari situs Kejarcita.id (2021), penghapusan USBN pada Sistem Pendidikan Nasional membawa dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan, meliputi:

1. Pemerataan Mutu Pendidikan. Ketika ujian nasional dilaksanakan baik sekolah maupun siswa berlomba untuk mendapatkan hasil ujian yang maksimal. Hasil ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi pihak sekolah, jika siswanya memperoleh nilai terbaik dalam ujian nasional. Namun, pada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, kompetisi nilai antar sekolah pada saat ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan prestasi lain dari segala aspek. Hal ini menjadi salah satu tujuan dihapusnya ujian nasional, sehingga diharapkan terjadinya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
2. Peningkatan Mutu Pengajar. Diharapkan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar oleh guru dengan dihapusnya ujian nasional. Guru harus memahami setiap bakat dan potensi siswa selama proses pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan penilaian atau asesmen. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak hebat secara akademis untuk menonjolkan keahlian mereka pada bidang yang lain. Guru diharapkan memiliki kepekaan terhadap bakat siswa serta mampu mengarahkan atau menstimulasinya agar maksimal.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana. Salah satu tujuan dihapusnya ujian nasional ialah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul tanpa melihat faktor angka semata. Sehingga adanya peran pemerintah sangat diperlukan dalam peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung sistem pembelajaran, seperti laboratorium, perpustakaan, tenaga pendidik yang berkualitas, dan sebagainya. Siswa diberikan ruang dan kesempatan untuk bereksperimen dan menampilkan bakat mereka, yang mana pemerintah dan sekolah bertugas sebagai pemberi fasilitas berupa sarana dan prasarana agar tujuan ini bisa tercapai.
4. Berkurangnya Beban Psikologis. Penghapusan ujian nasional telah mengangkat beban siswa dan guru terkait target nilai yang harus dicapai siswa dalam ujian agar lulus.
5. Adanya keadilan dalam sistem pendidikan. Soal yang sama pada ujian nasional di seluruh Indonesia sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Namun, jika dilihat, sistem pendidikan di Indonesia belum merata. Jangankan di seluruh Indonesia, antara desa dan kotapun terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Sehingga dengan dihapusnya ujian nasional, setiap sekolah berhak memberikan tolak ukur sendiri kepada para peserta didiknya. Hal tersebut akan lebih adil jika dibandingkan harus dilihat dari nilai hasil ujian nasional semata. Buku-buku pelajaran yang digunakan pun berbeda antar daerah. Bahkan, di beberapa wilayah Indonesia Timur, para guru tidak ada buku pegangan sebagai acuan untuk mengajar siswa. Mereka hanya berpatokan pada buku sekian tahun yang lalu, yang tidak update secara kurikulum

6. Lebih menghargai makna belajar yang sebenarnya. Dengan adanya penghapusan ujian nasional, penilaian yang bersifat angka akan semakin pudar dan diharapkan masyarakat, khususnya para siswa dan orang tua menyadari betapa pentingnya bakat dan keterampilan untuk masa depan.
7. Berkurangnya minat belajar siswa. Ketika penilaian anhka sudah tidak lagi menjadi prioritas utaa dikhawatirkan akan menjadi0kan para siswa tidak mempunyai keinginan berkompetisi. Mereka akan lebih santai menerima pelajaran, kurangnya disiplin dalam mengikuti pelajaran, dan bagi berberapa siswa, malah menurunkan minat belajar.

Selain hal tersebut di atas, problematika yang dihadapi guru dalam pengimplementasian kurikulum merdaka merupakan suatu tantangan yang harus kita perbaiki bersama hingga kekukrangan tertutupi menjadi kelebihan yang membawa kita lebih dekat dan sampai pada tujuan dan esensi pendidikan. Sebagaimana, penulis kuitp melalui situs kemendikbud.go.id, bahwa problematika dalam penerapan kurikulum baru ini karena terjadinya miskonsepsi pada saat implementasi kurikulum merdeka diberberapa satuan.pendidikan. Miskonsepsi tersebut meliputi:

1. Ganti kurikulum adalah tujuan. Miskonsepsi yang pertama adalah "ganti kurikulum merupakan tujuan". Padahal, yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran. Apabila kita memandang ganti kurikulum sebagai tujuan maka hal yang terjadi adalah kita akan disibukkan dalam urusan administratif seperti ganti istilah atau ganti format dokumen. Jadi, jangan memandang ganti kurikulum sebagai tujuan utama.
2. Terdapat penerapan kurikulum merdeka yang benar atau salah secara absolut. Banyak yang memiliki persepsi bahwa terdapat penerapan Kurikulum Merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Karena setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda, tentunya Kurikulum Merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan benar atau salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut, melainkan kontekstual. Kriteria utama dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah bagaimana implementasi yang dilakukan bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik. Guru menjadi salah satu elemen yang dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi Kurikulum Merdeka yang telah dilakukan.
3. Harus menunggu pelatihan dari pusat. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek percaya bahwa satuan pendidikan dan juga guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Peran

Kemendikbudristek dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan sekolah secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing konteks. Jadi, tidak ada pelatihan yang seragam untuk peningkatan kapasitas. Semuanya harus mencoba untuk memahami dan menerjemahkan secara mandiri untuk konteksnya masing-masing.

4. Proses Instan. Miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini seolah-olah bisa dilakukan secara instan. Nyatanya tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru untuk mengubah cara kita mengajar di dalam kelas. Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka pasti membutuhkan proses. Akan ada maju-mundur ataupun turun-naiknya. Hal yang terpenting adalah para guru dan juga sekolah tidak pernah berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan.
5. Hanya Bisa Diimplementasikan di Sekolah dengan Fasilitas Lengkap. Miskonsepsi yang terakhir adalah seolah-olah Kurikulum Merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Ini adalah keliru karena Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel sehingga bisa dioperasionalkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah mana pun, termasuk sekolah dengan fasilitas minim. Jadi, semua sekolah bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa perlu memikirkan apakah fasilitas yang ada sudah memadai atau belum. Hal yang terpenting adalah kesiapan dan juga dukungan seluruh warga sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup banyak waktu untuk mendalami konsep-konsep dan menguatkan kompetensi. Guru sendiri memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Model Kurikulum Merdeka yang luwes dan fleksibel ini justru menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaan di lapangan karena memiliki tafsir dan pemaknaan yang luas dan beragam. sehingga bagi guru yang tidak kreatif, mereka akan mengalami kesulitan dalam pengimpelementasiannya. Penilaian dalam kurikulum merdeka merupakan sebuah acuan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama proses belajar mengajar yang diperoleh. Penilaian dalam kurikulum merdeka harus mampu membuat peserta didik merdeka dan bebas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk memahami dan memilih

sistem penilaian yang seperti apa yang akan ia gunakan dalam evaluasi pembelajaran terhadap masing-masing siswa.

KESIMPULAN

1. Standar Penilaian Pendidikan yang termuat dalam Permendikbudristek 21 tahun 2022, terimplementasi dalam kurikulum merdeka dan mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022/2023. Implementasi standar penilaian kurikulum merdeka dilakukan dengan berberapa cara, yakni:
   1) Penyusunan Standar. Dalam penyusunan standar penilai kurikulum merdeka harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Depertemen Pendidikan atau Lembaga Pendidikan lainnya. Standar ditetapkan berdasarkan kompetensi yang diharapakan dan kurikulum dan tujuan pendidikan merdeka.
   2) Penyusunan instrumen penilaian harus dikembangkan dengan mengukur kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik berupa tes, observasi, atau lainnya.
   3) Pelaksanaan Penilaian dalam kurikulum merdeka harus dilakukan dengan dan hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
   4) Analisis dan perbaikan, dalam hal ini hasil penilaian harus dianalisis dan digunakan untuk mengevaluasi kualitas kurikulum dan mengembangkan perbaikan yang diperlukan;
   5) Monitoring dan evaluasi, pada implemenrasi standar penilaian kurikulum merdeka harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi kualitas kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa standar tersebut digunakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan.
2. Sistem penilaian dalam kurikulum merdeka tidak melihat berapa nilai (angka) yang siswa peroleh, namun melihat bagaimana siswa berproses dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan, seperti kemampuan siswa bernalar, menemukan pemecahan masalah dari permasalahan yang ditemukan disekitarnya.
3. Program Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik, meliputi:
   1) Tidak adanya pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika

menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan. Oleh karena untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mencanangkan berberapa program yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa program di antaranya seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Kelompok Kerja Guru (KKG). Pemerintah pula menyediakan platform merdeka belajar yang bisa dengan mudah diakses oleh para pendidik.

2) Keterbatasan referensi atau buku teks, baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Untuk mengatasi hal ini guru dituntut untuk selalu berubah mengikuti perkembangan yang sekarang mengarah ke era teknologi. Informasi pembelajaran dapat dengan mudah didapatkan melalui dunia digital. Sehingga tidak adanya buku bukan lagi halangan untuk menolak perubahan.
3) Kompetisi (*Skill*) yang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya. Padahal, untuk melaksanakan merdeka belajar guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa. Kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat.

Perubahan yang terjadi bukan tanpa alasan. Sistem pendidikan yang dianggap usang perlu diperbaiki melalui hasil evaluasi yang dilakukan selama ini. Guru sebagai garda terdepan dari berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, mau tidak mau harus siap mengambil berbagai upaya dan berani belajar maupun mencoba. Agar tidak hanya beradaptasi, namun juga mampu menyiapkan siswa sebagai generasi bangsa supaya mampu menjawab tantangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat SMP, '5 Miskonsepsi Yang Penting Diluruskan Pada Implementasi Kurikulum Merdeka', *Ditsmp. Kemendikbud.Go.Id*, 2022 <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/5-miskonsepsi-yang-penting-diluruskan-pada-implementasi-kurikulum-merdeka/>

H, Lutviyana Nur, 'Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya', *Al-Mafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4.2 (2020), 11–20

Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep Dan Manajemen)*, 1st edn (Yogyakarta: UNY Press, 2020) <https://www.google.co.id/books/edition/EVALUASI_PEMBELAJARAN_KONSEP_DAN_MANAJEM/YlVBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=EVALUASI+DAN+penilaian+pendidikan+di+indonesia+saat+ini&printsec=frontcover>

Ihsan, Muhammad, 'Kesiapan Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar', 1.1 (2022), 37–46 <https://doi.org/10.20527/tmkm.v1i1.428>

Izza, Aini Zulfa, Mufti Falah, and Siska Susilawati, 'Studi Literatur: PROBLEMATIKA EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN DI ERA MERDEKA BELAJAR', *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, 1 (2020) <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip/article/view/452>

Kemendikbud, 'Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah' (JDIH BPK RI, 2022) <BN.2022/No.460, https://jdih.kemdikbud.go.id/: 9 hlm>

Kurka, '8 Paradigma Asesmen Kurikulum Merdeka', *Kurikulum Merdeka (Pusat Pengembangan Kurikulum*, 2022 <https://kurikulummerdeka.com/paradigma-asesmen-kurikulum-merdeka/>

Kurniasih, 'Dampak Positif Dan Negatif Dari Penghapusan Ujian Nasional Untuk Sistem Pendidikan Nasional', 2021 <https://blog.kejarcita.id/dampak-positif-dan-negatif-dari-penghapusan-ujian-nasional-untuk-sistem-pendidikan-nasional/>

Lukman Hadi, 'Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar', 2020 <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4302861>

Mahfud, Al, 'Implementasi Kurikulum Merdeka, Tantangan, Dan Solusi', *Yoursay.Id*, 2022 <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/08/08/113517/implementasi-kurikulum-merdeka-tantangan-dan-solusi>

NJ MED, 'Database Pendidikan Internasional', *World Top 20 Education Poll*, 2023 <https://worldtop20.org/education-database/>

Rahayu, Eka, and Fina Diafatus Sa'adah, 'ANALISIS PROBLEMATIKA KURIKULUM MERDEKA PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA', *Jurnal Pendidikan Matematika*, 04.01 (2023) <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Dikmat/article/view/160>

Riadi, Akhmad, 'PROBLEMATIKA SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN', 15.27 (2017) <https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v15i27.1593>

Rossa, Ade Tutty R, Wahyu Satya, A Suganda, Ai Sumarni, Fuad Rinaldi, Hani Hadiati Pujawardani, and others, *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan (Konsep Dan Implementasi)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/PROJEK_PENGUATAN_PROFIL_PELAJAR_PANCASIL/87GpEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=standar+penilaian+dalam+kurikulum+merdeka&pg=PA138&printsec=frontcover>

Saryanto, Eva Nurhasanah, Tuti Khairani Hararap, Achmad Muharam Basyari, Muhammad Hasan, Sukendi, and others, *Inovasi Pembelajaran Merdeka Belajar* (Bandung: CV. Media Sains

Indonesia, 2022) <https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pembelajaran_Merdeka_Belajar/HiSIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>

subagis, Jabal, 'Kurikulum Merdeka : USBN Dihapus, Lulus Dengan Menyenangkan', *Beritakita1.Click*, 2023 <https://www.beritakita1.click/kurikulum-merdeka-usbn-dihapus-lulus-dengan-menyenangkan>

Susanti, Marnis, Three Rahmadona, and Yanti Fitria, 'Studi Literatur: Perbedaan Penilaian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka', *Jurnal Basicedu*, 7.1 (2023), 339–50 <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4444>

Wangsaguna, Hidayah, 'Telaah Asesmen Dalam Kurikulum Merdeka', *Calakpendidikan.Com*, 2023 <https://calakpendidikan.com/2023/02/11/telaah-asesmen-dalam-kurikulum-merdeka/>

wartaguru.id, 'Standar Penilaian Kurikulum Merdeka, Guru Wajib Tahu', *Wartaguru.Id*, 2023 <https://wartaguru.id/standar-penilaian-kurikulum-merdeka-guru-wajib-tahu/2/>

Zulaiha, Siti, Tika Meldina, and Meisin, 'Problematika Guru Dalam Menerpa Kurikulum Merdeka Belajar', *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9.2 (2022) <https://doi.org/10.24042/terampil.v9i2.13974>